

PUBLIKASI ILMIAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK
(KIS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN SAMBAS.

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menempuh Ujian Tesis

Guna Meraih Gelar Magister Hukum

Pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura



Oleh:

Ivandri, S.E.

NPM. A21208090

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PONTIANAK
2015

PUBLIKASI ILMIAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM
MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS

Diajukan

Oleh:

Ivandri, S.E.

NPM. A21208090

Pembimbing I : Dr.Marcus Lukman, S.H.,M.H

Pembimbing II : Silvester Thomas, SH., M.Si

ABSTRACT

This thesis is studies of The Problem of Semparuk Industry Area Managemnt Policy Base on Government Regulation Number 24, 2009 In Supporting Growth of Sambas Economics. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Legal and Technical Constraint Semparuk Industry Area is not able yet to built as planned is : a. Has not the forming of Industrial company as BUMD and location of company capital Rp. 1.800.000.000,00 as capital to manage Kapet Khatulistiwa and especially Semparuk Indusry Area. The responders also express, Regulation of Bussines Industry Area Licence, Permit From Industrial Extension, liberation of Soil; land; ground, HGB Management, and equipment of other administration still be circumlocutary and have not yet enough supported to draw enthusiasm Investor does invesment in Semparuk Industry Area. At the time of this research done, either infra and supra structur and also supporting facilities for in Semparuk Industry Area still have not there are Soil ripening activity, Development of Area facilities and basic facilities caused by constraint yuridis as told at above an letter. Besides service factor, interest of investor candidate, politics stability, and national economy stability and also in area also influential to expansion fluency of Semparuk Industry Area. 2. Effort that is must be done by local government Sambas Region and West Kalimantan Province to quicken similar of Semparuk Industry Area is by quickening forming of Company Chatulistiwa Inwrought Economic Expansion Area/Semparuk Industry Area and forwards does adjustment of management of Chatulistiwa Inwrought Economic Expansion Area with Economics Special Area. Hereinafter is recommended, With implementaion of invitores Law Number 39. 2009, expected there are one arrangement unities about special area in the economic area in Indonesia either to Free Trade Area, Free port and also Inwrought Economic Expansion Area. In consequence, Development Area of Equator Economics can be extended or melted to become special economics area, having synergy with development expansion of frontier West Kalimantan Province - Sarawak Malaysia Timur.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Semparuk (KIS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan Industri Semparuk belum dapat dibangun sebagaimana direncanakan adalah : a. Belum terbentuknya Perusahaan Industri sebagai BUMD dan penempatan modal perusahaan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 sebagai modal dasar/dana sharing/penyertaan modal untuk mengelola Kapet Khatulistiwa dan khususnya Kawasan Industri Semparuk. Para responden juga menyatakan, Peraturan Perundangan mengatur Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Industri, Pembebasan Tanah, Pengurusan HGB, dan kelengkapan administrasi lainnya masih berbelit-belit dan belum cukup menunjang untuk menarik minat Investor melakukan investasi di Kawasan Industri Semparuk. b. Pada saat penelitian ini dilakukan, baik prasana maupun sarana di Kawasan Industri Semparuk masih belum ada kegiatan Pematangan Tanah, Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan karena adanya kendala yuridis sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas. Selain itu faktor pelayanan, ketertarikan calon investor, stabilitas politik, dan stabilitas perekonomian nasional maupun di daerah juga berpengaruh terhadap kelancaran pengembangan Kawasan Industri Semparuk. 2. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat terbangunnya Kawasan Industri Semparuk adalah dengan mempercepat pembentukan Badan Hukum Perusahaan Kapet Khatulistiwa/Kawasan Industri Semparuk dan ke depan melakukan Penyesuaian pengelolaan Kawasan Kapet Khatulistiwa dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya direkomendasikan, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, diharapkan terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang ada di Indonesia baik terhadap Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas maupun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Karena itu, Kawasan Pembangunan Ekonomi Khatulistiwa dapat diperluas/diintegrasikan atau dilebur menjadi kawasan ekonomi khusus, yang bersinergi dengan pengembangan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	33
H. Jadwal Penelitian.....	33
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Eksistensi Hukum.....	34
B. Globalisasi Ekonomi	47
C. Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi	58
D. Upaya Menata Hukum Ekonomi Indonesia.....	88
BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan Industri Semparuk belum dapat diwujudkan sebagaimana direncanakan.....	102
B. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat berfungsinya Kawasan Industri Semparuk.....	102

118

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 151

B. Saran..... 152

DAFTAR PUSTAKA

153

Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pemerintah mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan kawasan andalan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dimaksud, ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Sanggau yang kemudian wilayahnya diperluas dan diubah dengan nama Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 188 Tahun 2002 tentang Perluasan Wilayah Kapet Sanggau ke Wilayah Kecamatan Perbatasan Lini I di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu Serta Penggantian Nama Kapet Sanggau Menjadi Kapet Khatulistiwa.

Dalam melaksanakan berbagai kegiatannya untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerah, Badan Pengelola Kapet Khatulistiwa memacu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) Khatulistiwa Kalimantan Barat, yang salah satunya dengan membentuk **Kawasan Industri Semparuk (KIS)**.

Badan Pengelola (BP) Kapet Khatulistiwa yang terakhir dibentuk berdasarkan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat**, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, sinkronisasi, koordinasi dan motivasi pembangunan di wilayah Kapet berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kapet (RIK) dan memberikan fasilitasi pertimbangan teknis di bidang perijinan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi di wilayah Kapet.

Strategi pengembangan Kapet Khatulistiwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Induk Kapet dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan pengembangan, yakni pendekatan **kewilayahan**, **komoditas**, dan **insentif**. Pengembangan kewilayahan di Kapet Khatulistiwa diwujudkan dengan mengembangkan 10 (sepuluh) pusat pertumbuhan Kapet yang terdiri dari: 5 (lima) pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara, yakni Paloh-Sajingan (Palsa), Jagoi Babang, Entikong, Jasa dan Nanga Badau; 3 (tiga) di kawasan penyeimbang Kalimantan Barat, yakni Tayan, Serimbu, dan Sekadau; dan 2 (dua) di kawasan pesisir Kalimantan Barat yakni Singkawang dan Kawasan Industri Semparuk (KIS).

Dengan terbatasnya kewenangan, sumber dana dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BP Kapet Khatulistiwa, maka implementasi/pelaksanaan kebijakan pembangunan terhadap 10 (sepuluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan secara simultan akan tetapi dilakukan secara bertahap dan untuk tahap awal telah ditetapkan KIS sebagai objek pembangunan.

Dalam rangka pembangunan KIS sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Kapet Khatulistiwa, secara simultan sejak tahun 2000 BP Kapet Khatulistiwa berkerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas telah melakukan berbagai upaya/kegiatan berupa¹:

1. Penyusunan studi perencanaan teknis kawasan meliputi: Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri pemangkat seluas ± 5.787 hektar, Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Industri Pemangkat/Semparuk, Amdal Kawasan dan studi analisis kelayakan financial KIS.
2. Pembebasan lahan secara bertahap, dan areal yang telah dibebaskan seluas ± 35 hektar.
3. Penyediaan infrastruktur dasar berupa:
 - a. Pembangunan badan jalan akses KIS-jalan provinsi (Pontianak-Sambas) sepanjang 1.650 M x 15 M.
 - b. Pengembangan badan jalan akses KIS-Pelabuhan Sintete sepanjang 2.674 M x 20 M.

¹ Badan Pengelola Kapet Khatulistiwa Kalimantan Barat, Tahun 2011.

- c. Pembangunan badan jalan internal sepanjang 714 M x 10 M.
 - d. Pengerukan embung/kolam penampung air baku seluas 2 x 0,4 hektar.
 - e. Pengerukan kolam penampung limbah cair.
 - f. Pembangunan gedung pusat informasi KIS.
4. Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU), antara:
- a. BP Kapet Khatulistiwa dengan pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka pembangunan dan pengelolaan KIS.
 - b. BP Kapet Khatulistiwa dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pemanfaatan dan pembangunan KIS.
 - c. BP dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembentukan badan usaha sebagai pengelola KIS dan pusat pertumbuhan lainnya.

Rencana pembentukan badan usaha untuk mengelola KIS dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah Kapet Khatulistiwa terus diupayakan dalam berbagai kegiatan, dan bahkan dalam Rapat Pleno XII Anggota BP Kapet Khatulistiwa pada Tahun 2005 yang diikuti oleh Anggota Badan Pengelola yang terdiri dari Gubernur, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas/Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Bupati/Walikota di wilayah Kapet Khatulistiwa, menegaskan/ merekomendasikan untuk segera membentuk badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berfungsi sebagai pengelola KIS dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah Kapet Khatulistiwa.

Dalam Rapat Pleno XII Anggota BP Kapet Khatulistiwa tersebut juga disepakati untuk modal pembangunan badan usaha (PT) dimaksud diperoleh dari *sharing* pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa yang masing-masing kabupaten/kota sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal yang sama juga ditegaskan dalam Rapat Pleno XIII Anggota BP Kapet Khatulistiwa Tahun 2007.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama (MoU) antara BP Kapet Khatulistiwa dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa serta Hasil Rapat Pleno XII Anggota BP Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembentukan badan usaha (berbentuk PT) sebagai pengelola KIS dan pusat pertumbuhan lainnya, maka

telah terhimpun dana bantuan sebesar Rp. **1.800.000.000,00** (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari **Rp. 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah) dari **pemerintah Provinsi Kalimantan Barat** dan **Rp. 1.400.00.000,00** (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari **pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu** masing-masing Rp. **200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah), merupakan dana bantuan untuk pendirian badan usaha yang berasal dari alokasi subsidi/bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Barat TA. 2006 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 287 Tahun 2006.

Dana bantuan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut di atas sampai dengan saat ini masih utuh dan belum dipergunakan untuk kegiatan apapun dan badan usaha yang rencananya akan dibentuk untuk mengelola KIS dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah Kapet Khatulistiwa juga belum terwujud.

Walaupun telah cukup banyak upaya dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan KIS dan pembentukan badan usaha (berbentuk PT) untuk mengelola KIS dan Pusat Pertumbuhan lainnya di wilayah Kapet Khatulistiwa, namun dalam kenyataannya masih menimbulkan permasalahan antara lain:

Izin Usaha Kawasan Industri

- Untuk melakukan kegiatan usaha kawasan industri harus memiliki izin usaha, hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Sampai dengan saat ini KIS belum memiliki izin usaha kawasan industri, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2009 bahwa Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sementara itu KIS belum ada perusahaan yang akan mengelola KIS.

Dengan demikian untuk mendapatkan izin usaha kawasan industri, maka terlebih dahulu dibentuk perusahaan kawasan industri.

1. Perusahaan Pengelola KIS.

- Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2009 bahwa Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan, kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perusahaan Kawasan Industri dapat berbentuk: badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; koperasi; atau badan usaha swasta.
- BP Kapet Khatulistiwa sebagai fasilitator dalam pembangunan KIS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa sepakat bahwa perusahaan pengelola KIS dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kapet Khatulistiwa berbentuk **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**, sehingga pembentukannya **berdasarkan pada ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Dari berbagai pertemuan yang dilakukan oleh BP Kapet Khatulistiwa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa disepakati bahwa badan hukum perusahaan yang akan mengelola KIS dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kapet Khatulistiwa adalah dalam bentuk PT, sehingga pembentukannya berpedoman/berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Penggunaan Dana Sharing/Bantuan

- Berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara BP Kapet Khatulistiwa dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa serta Hasil Rapat Pleno XII Anggota BP Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembentukan badan usaha (berbentuk PT) sebagai pengelola KIS dan pusat pertumbuhan lainnya,

maka telah terhimpun dana bantuan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Rp. 1.400.00.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), merupakan dana bantuan untuk pendirian badan usaha yang berasal dari alokasi subsidi/bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Barat TA. 2006 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 287 Tahun 2006.

- Dana tersebut di atas disimpan dalam rekening tersendiri khusus untuk modal pembentukan badan usaha (PT), namun demikian terdapat beberapa kendala dalam penggunaan dana tersebut, yaitu **status dana yang terhimpun belum dipertegas apakah merupakan bantuan atau penyertaan modal.**
- Jika melihat nomenklatur yang tertera dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 287 Tahun 2006 tentang Penetapan alokasi subsidi/bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Barat TA. 2006, **berarti status dana tersebut adalah bantuan yang diarahkan untuk BP Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembentukan badan usaha KIS.** Namun jika melihat naskah kesepakatan bersama (MoU) antara BP Kapet Khatulistiwa dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa, maka **status dana tersebut adalah dana sharing/penyertaan modal.**
- **Apabila status dana tersebut di atas merupakan penyertaan modal, maka seharusnya ada peraturan daerah tentang penyertaan modal, dan penggunaan dana dimaksud secara periodik akan tercatat dalam neraca keuangan daerah sebagai penyertaan modal.** Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan

disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

- **Apabila status dana adalah bantuan murni untuk BP Kapet Khatulistiwa untuk membentuk badan usaha (PT)**, maka hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kapet, di mana BP Kapet bukan merupakan lembaga yang bersifat *profit oriented*.
- Dengan kondisi seperti tersebut di atas, tidak memungkinkan jika dana bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa akan ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing, karena dana bantuan tersebut pada TA. 2006, dan akan bertentangan dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- Mengingat bahwa pada prinsipnya dana bantuan yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kapet Khatulistiwa untuk pembentukan badan usaha (PT) sebagai perusahaan yang mengelola KIS dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kapet Khatulistiwa, dan untuk membentuk badan usaha dalam bentuk PT diperlukan adanya modal dasar baik yang ditempatkan maupun yang disetor, **maka dapat diartikan bahwa dana bantuan tersebut merupakan modal dasar dari PT yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kapet Khatulistiwa sesuai dengan jumlah dana masing-masing.**

Pada tahun 2011, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim untuk melakukan kajian terkait dengan pengelolaan KIS, namun sampai dengan saat ini belum ada hasil dari kerja tim. Kondisi seperti ini mengakibatkan KIS belum dapat dikelola, sehingga berbagai fasilitas yang dibangun di KIS belum dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas, padahal sudah cukup banyak perusahaan yang berminat untuk menggunakan fasilitas KIS untuk membangun industri.

Permasalahan di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS) BERDASARKAN PERATURAN**

PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Kawasan Industri Semparuk belum dapat dibangun sebagaimana yang direncanakan?
2. Upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat terbangunnya Kawasan Industri Semparuk?

Pembahasan

A. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan Industri Semparuk belum dapat diwujudkan sebagaimana direncanakan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data sekunder dan hasil wawancara dengan responden penelitian ini, yang terdiri atas : 1) Ketua Harian Kapet Khatulistiwa Kalimantan Barat; 2) Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Barat; 3) Kepala DPPKAD Kabupaten Sambas, dan 4) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh informasi/data tentang faktor penyebab Kawasan Industri Semparuk belum dapat diwujudkan sebagaimana direncanakan sebagai berikut :

1. Kendala Yuridis

Selain masalah **pembentukan badan hukum** dan **penempatan modal perusahaan** sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Rp. 1.400.00.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apakah berstatus bantuan **untuk BP Kapet Khatulistiwa dalam rangka pembentukan badan usaha KIS,** ataukah **berstatus sebagai dana sharing/penyertaan modal,** Para responden juga menyatakan, Peraturan Perundangan yang Ada Belum Cukup Menunjang untuk menarik minat Investor melakukan investasi di Kawasan Industri Semparuk. Dinilai berbelit-belit dan kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup usaha di kawasan industri.

Sebagaimana diketahui, keberadaan kawasan industri diatur secara khusus dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan : “Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, baik yang lama maupun yang baru”. Peraturan perUndang-undangan cepat berubah, akan tetapi kurang menopang akselerasi kegiatan kawasan industri.

Contoh di bidang perizinan, semula diatur dengan Keppres Nomor 53 tahun 1989, kemudian dilakukan perubahan dan penambahan dengan Keppres Nomor 98 tahun 1993, selanjutnya diganti dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1996, dan dioperasikan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 50/MPP/Kep/2/1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Tetapi sejalan dengan terbentuknya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juga disesuaikan dengan semangat Otonomi Daerah.

Pada saat ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri. Mekanisme perizinan yang diatur peraturan pemerintah ini antara lain sebagai berikut :

izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Industri

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri wajib memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip dalam batas waktu 2 (dua) tahun wajib melaksanakan: a. penyediaan/penguasaan tanah; b. penyusunan rencana tapak tanah; c. pematangan tanah; d. penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapatkan pengesahan ; e Perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan; f. penyusunan Tata Tertib Kawasan Industri; g. pemasaran kaveling Industri; dan h, penyediaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan pelayanan jasa bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri. Batas

waktu untuk mempersiapkan pembangunan Kawasan Industri hanya dapat diperpanjang untuk satu kali dengan batas waktu paling lama 2 (dua) tahun.²

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip wajib memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri dengan mengajukan permohonan kepada: a. bupati/walikota untuk Kawasan Industri yang lokasinya di wilayah satu kabupaten/kota; b. gubernur untuk Kawasan Industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota; atau c. Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk Kawasan Industri yang lokasinya lintas provinsi. Pemberian Izin Lokasi Kawasan Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.³

Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Perusahaan Kawasan Industri dimaksud dapat berbentuk: a. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; b. Koperasi; atau c. Badan usaha swasta.⁴

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri. Penunjukan pihak lain diberitahukan kepada pemberi Izin Usaha Kawasan Industri. Penunjukkan pengelolaan Kawasan Industri kepada pihak lain dimaksud tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.⁵

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melakukan perluasan Kawasan Industri wajib memperoleh **Izin Perluasan Kawasan Industri** terlebih dahulu. **Izin Usaha Kawasan Industri** dan **Izin Perluasan Kawasan Industri** diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin

² Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

³ Pasal 14, *Ibid.*

⁴ Pasal 15, *Ibid.*

⁵ Pasal 16, *Ibid.*

Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.⁶

a. Hak Penggunaan Atas Tanah Kawasan Industri

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang telah dikuasai dan dikembangkan. Hak Guna Bangunan Kawasan Industri dapat dipecah menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling. Pemecahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri. Ketentuan dan tata cara pemberian Hak Guna Bangunan dan pemecahan Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Kawasan Industri yang dikembangkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan Hak Guna Bangunan berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. Hak Guna Bangunan dapat diberikan untuk masing-masing kaveling atau gabungan beberapa kaveling.⁸

a. Kewajiban Kawasan Industri

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁹ Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri. Tata Tertib Kawasan Industri paling sedikit memuat informasi mengenai: a. hak dan kewajiban masing-masing pihak; b. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan; c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri. Kawasan Industri wajib memfasilitasi

⁶ Pasal 17, *Ibid.*

⁷ Pasal 18, *Ibid.*

⁸ Pasal 19, *Ibid.*

⁹ Pasal 20, *Ibid.*

perizinan dan hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.¹⁰ Kawasan Industri wajib memenuhi pedoman teknis Kawasan Industri. Ketentuan mengenai pedoman teknis diatur dengan Peraturan Menteri.¹¹

b. Kewajiban Perusahaan Industri Di Kawasan Industri

Perusahaan Industri di dalam Kawasan industri wajib memiliki: a. Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan b. Upaya Pemantauan Lingkungan. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang mengelola atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapat pengesahan. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dan perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah.¹²

Setiap Perusahaan Industri di kawasan Industri wajib: a. memenuhi semua ketentuan perizinan dan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku; b. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah; c. melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian lahan; dan d. mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak melakukan pembangunan pabrik. Tata cara pengembalian kaveling Industri diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kawasan Industri masing-masing Kawasan Industri.¹³

c. Sanksi Administratif

Menteri atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif kepada:

- 1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

¹⁰ Pasal 21, *Ibid.*

¹¹ Pasal 22, *Ibid.*

¹² Pasal 23, *Ibid.*

¹³ Pasal 24, *Ibid.*

- 2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak mematuhi penetapan patokan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d;
- 3) Perusahaan Kawasan industri yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat d). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Izin Usaha Industri dan/atau Tanda Daftar Industri; c. pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri yang dimiliki;
- 4) pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau Tanda Daftar Industri; dan/atau e. pencabutan Izin Usaha Kawasan Industri.¹⁴

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.¹⁵

Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dikenakan kepada Perusahaan Industri apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b. Sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri dikenakan kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga tidak memenuhi ketentuan patokan harga dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1). (3) Dalam hal Perusahaan Industri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Perusahaan Kawasan Industri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1), Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dapat mengajukan pembatalan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

¹⁴ Pasal 26, *Ibid.*

¹⁵ Pasal 27, *Ibid.*

ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterbitkannya putusan pembekuan izin tersebut.¹⁶

Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dikenakan kepada Perusahaan Industri, atau pencabutan izin Usaha Kawasan Industri dikenakan kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tetap tidak memperbaiki kesalahannya atau permohonan pembatalan pembekuan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditolak.¹⁷

2. Faktor Teknis

Setelah diperolehnya izin-izin sebagaimana dikemukakan di atas, Perusahaan kawasan industri harus melakukan kegiatan pembangunan fisik, secara garis besar pembangunan fisik kawasan industri meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembebasan Tanah

Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki semua perizinan yang dipersyaratkan di atas, dapat melakukan aktivitas pembebasan tanah dengan melakukan transaksi langsung kepada para pemilik tanah. Dalam praktiknya karena tanah yang akan dibebaskan untuk lokasi kawasan industri meliputi hamparan yang luas (melebihi 100 ha), maka dalam pembebasan tanah ditempuh secara bertahap dengan mengacu keluasan tanah dalam izin lokasi tersebut. Terkait dengan masa berlakunya izin lokasi sebagai dasar untuk dapat melakukan pembebasan tanah, ternyata jangka waktu berlakunya izin lokasi tersebut dinilai dapat menghambat pengembangan kawasan industri karena dengan luasnya areal yang dicadangkan untuk kawasan industri yang harus dibebaskan, waktu yang diberikan untuk pembebasan tanah dalam peraturan izin lokasi yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun lagi, masih dirasakan kurang cukup. Sebab, kegiatan pembebasan tanah tidak hanya menyangkut

¹⁶ Pasal 28, *Ibid.*

¹⁷ Pasal 29, *Ibid.*

biaya, tetapi juga proses negosiasi dengan pemilik tanah yang bisa berlarut-larut (memakan waktu yang lama).

b. Pengurusan Hak Guna Bangunan

Perusahaan kawasan industri yang telah melakukan pembebasan tanah berkewajiban mengurus dan mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) Induk kawasan industri. Pengajuan HGB induk harus dilampiri Keterangan Rencana Ruang Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan pembebasan tanah dan memperoleh HGB induk kawasan industri, kendala yang mengedepan antara lain :

- pembebasan tanah yang cukup luas memerlukan dana tunai cukup besar, sehingga pembebasan tanah tidak dapat dilakukan secara sekaligus. Sedangkan dana kredit/pinjaman dari Bank tidak dapat digunakan karena dilarang peraturan pembebasan tanah. Pembebasan tanah yang dilakukan secara bertahap membuka peluang melonjaknya harga tanah untuk pembebasan tanah tahap berikutnya. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi tingginya harga pembebasan tanah ialah naiknya nilai NJOP atas tanah-tanah di dalam kawasan industri.
- Adanya pemilik tanah di dalam kawasan industri yang tidak/belum bersedia menjual tanahnya, atau mematok harga tanah dengan harga yang sangat tinggi, sehingga tanah-tanah menjadi sulit dibebaskan.
- Proses pengurusan HGB Induk di Kantor Pertanahan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat menghambat penjualan kavling industri kepada para investor. Apabila tanah kawasan industri tersebut belum memiliki HGB induk, maka oleh investor di nilai belum ada jaminan kepastian hukum. Para investor menjadi ragu-ragu untuk membeli kavling industri di dalam kawasan industri tersebut.

c. Pematangan Tanah dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kegiatan selanjutnya dalam pembangunan fisik suatu kawasan industri setelah tanah dibebaskan adalah melakukan pematangan tanah:

- b. **Meratakan tanah**, dilakukan dengan cara melakukan penimbunan / pengurugan dan pengeprasan / pemotongan tanah. Kegiatan ini harus memperhitungkan kontur tanah, musim panas dan musim hujan. Persil-

persil tanah yang telah diurug dan diratakan kemudian dibuat kavling-kavling industri dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pembangunannya disesuaikan dengan Master Plan Kawasan industri yang bersangkutan.

c. Prasarana dan Sarana Kawasan Industri

Prasarana yang harus dibangun di kawasan industri adalah jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/ jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, saluran pengumpul air limbah industri, instalasi pengolah air limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan, unit pemadam kebakaran dan pagar kawasan industri.

Sarana kawasan industri yang harus dibangun meliputi: Kantor Pengelola, Bank, kantor Pos, Kantor pelayanan Telekomunikasi, Poliklinik, Kantin, Sarana Ibadah, Pos Keamanan, Perumahan Karyawan Industri dan Mess transito, sarana kesegaran jasmani, halte angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya.

Pada saat penelitian ini dilakukan, baik prasana maupun sarana di atas, masih belum terbangun karena adanya kendala yuridis sebagaimana dikemukakan di atas.

3. Faktor Pelayanan

Hal yang tak kalah penting di dalam menarik minat investor menanamkan modalnya di dalam kawasan industri adalah pelayanan. Menurut para responden, adanya pelayanan yang baik kepada para investor merupakan keunggulan bagi kawasan industri di banding investor yang berlokasi di luar kawasan industri, karena pelayanan adalah bagian dari kegiatan utama kawasan industri dalam memberikan kemudahan bagi para investor. Adapun bentuk pelayanan yang di berikan pengelola kawasan industri terhadap investor antara lain :

- 1) Pada saat pra investasi, yaitu memberikan bantuan dalam pengurusan izin-izin investasi sampai dengan setelah investor merealisasikan menanamkan modal di dalam kawasan industri dan mengoperasionalkan usahanya.
- 2) Pada saat investor telah mengoperasionalkan pabriknya, pelayanan yang diberikan pengusaha kawasan industri selama investor berada di dalam lokasi kawasan industri adalah meliputi penyediaan air bersih, listrik, kebersihan lingkungan, perawatan jalan, saluran dan termasuk jaminan keamanan bagi investor dan lainnya.

Pelayanan tersebut harus diberikan kepada investor semaksimal mungkin, semisal ada salah satu investor mempunyai keluhan, maka pengelola kawasan industri segera melakukan tindakan untuk menanggapi komplain tersebut, sekaligus memberikan jalan keluarnya.

Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian

Stabilitas politik merupakan salah satu faktor yang menentukan ketertarikan investor asing maupun dalam negeri untuk melakukan investasi di kawasan industri yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka penggairahan iklim investasi, dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka. Pembangunan kawasan industri, prasarana seperti jalan, telepon serta listrik yang saat ini dapat ditangani oleh swasta, diperkirakan akan lebih siap untuk dapat menunjang pelaksanaan investasi.

Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai akan merangsang investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang.

Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan, dan keindahan alam suatu daerah di Indonesia tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, industri perkayuan, industri kertas dan industri perhotelan (*tourisme*), banyak diminati para investor dalam rangka PMDN maupun PMA.

Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu dan mainan anak-anak.

Menurut para responden, menarik tidaknya sesuatu daerah sebagai pusat pertumbuhan dan sebagai pusat industrialisasi yang baru, tergantung kepada faktor-faktor berikut : “keadaan prasarana, keadaan pasar, dan keadaan beberapa jenis *external economies* yang tersedia”. Dengan adanya prasarana yang baik sesuatu industri dapat dengan mudah berhubungan dengan berbagai tempat di daerah itu, dengan daerah lain dan ke luar negeri; menghemat ongkos pengangkutan dalam pengangkutan bahan mentah dan hasil produksinya; dan memungkinkan mengurangi jumlah investasi modalnya. Oleh sebab itu prasarana yang baik mempertinggi efisiensi industri dan mengurangi keperluan untuk memberikan perangsang kepada industri-industri yang akan ditumbuhkan.

Hubungan sesuatu industri dengan pasarnya, dapat dibedakan ke dalam 3 golongan pokok, yaitu : industri yang mendekat ke bahan mentah (*resource oriented industry*), industri yang mendekat kepada pasarnya (*market oriented industry*), dan industri yang letaknya netral terhadap pasar maupun bahan mentah (*foot-loose industry*).

Bagi industri golongan pertama, menarik tidaknya sesuatu daerah ditentukan oleh apakah di daerah tersebut terdapat bahan mentah yang

diperlukannya. Tersedianya bahan mentah dengan harga yang murah telah memberikan dorongan yang besar kepada industri bersangkutan untuk mengembangkan usahanya, dan dengan demikian mengurangi perangsang fiskal dan keuangan.

Industri golongan kedua, menarik tidaknya sesuatu daerah terutama tergantung pada apakah daerah tersebut tersedia pasar yang cukup bagi kegiatan industri tersebut, dengan demikian maka perangsang fiskal dan keuangan yang akan diberikan dapat dikurangi.

Industri golongan ketiga, efisiensinya tidak tergantung pada tersedianya pasar atau bahan mentah di daerah tersebut. Dalam keadaan demikian industri tersebut mempunyai lebih banyak kebebasan dalam menentukan lokasi dari industrinya dan perangsang yang disediakan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap keputusan mereka untuk menentukan lokasi dari industrinya.

Faktor-faktor penting lainnya yang akan menentukan menarik tidaknya suatu daerah sebagai lokasi industri adalah *external economies* ialah tersedianya prasarana umum untuk memperoleh kredit jangka pendek, tersedianya tenaga ahli yang diperlukan, tersedianya perusahaan service atau jasa untuk industri tersebut, tersedianya perumahan bagi para pekerja, dan tersedianya fasilitas rekreasi dan pendidikan untuk para pekerja. Tersedianya berbagai fasilitas tersebut akan menjamin kelancaran jalannya kegiatan perusahaan dan selanjutnya akan mempertinggi efisiensi kegiatannya.

Tanpa tersedianya perusahaan jasa, perumahan pekerja, tempat rekreasi dan institusi pendidikan yang memadai, industri-industri terpaksa menyediakan fasilitas tersebut dan mempertinggi jumlah investasi yang perlu mereka keluarkan. Sedangkan kesukaran dalam mendapatkan kredit jangka pendek untuk membiayai pengeluaran rutin terutama akan mengganggu kelancaran jalannya perusahaan. Dan, akhirnya ketiadaan tenaga kerja ahli yang mahir menyebabkan industri-industri harus mencari daerah lain dan hal ini akan mempertinggi biaya. Karena itu, apabila berbagai jenis *external economies* tersebut tidak cukup tersedia, maka pemerintah perlu memperbesar perangsang fiskal dan keuangan yang diberikan untuk mengimbangi kekurangan dari berbagai fasilitas di atas.

B. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat berfungsinya Kawasan Industri Semparuk

Untuk dapat mewujudkan Kawasan Industri Semparuk berfungsi sebagaimana direncanakan, maka sedikitnya ada tiga langkah utama yang perlu dipersiapkan :

1. Pembentukan Badan Hukum Perusahaan Kawasan Industri Semparuk

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan kegiatan usaha kawasan industri haruslah memiliki izin usaha industri. Dan untuk mendapatkan izin usaha industri haruslah terbentuk Perusahaan Terbatas (PT) Kawasan Industri baik sebagai: **“badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; koperasi; ataupun badan usaha swasta”**. Karena, sudah ada kesepakatan antara BP Kapet Khatulistiwa sebagai fasilitator dalam pembangunan KIS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kapet Khatulistiwa, bahwa perusahaan pengelola KIS dan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kapet Khatulistiwa berbentuk **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**, maka seyogiyanya pembentukan Perusahaan Industri Daerah (BUMD) tersebut segera dilakukan. Pembentukan tersebut, harus mengacu pada ketentuan **Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**. Dalam hal ini, Gubernur selaku Kepala Daerah dan Para Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah karena jabatannya berfungsi sebagai Pendiri Perusahaan Industri dimaksud.

Sebagai modal dasar, jelas dapat digunakan dana bantuan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Rp. 1.400.00.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari pemerintah **Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan**

Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dana bantuan tersebut sebaiknya diposisikan/ditempatkan sebagai penyertaan modal dalam akta pendirian Perseroan BUMD yang hendak dibentuk. Karena itu, wajib diformulasikan diformulasikan ke dalam Peraturan Daerah **tentang penyertaan modal, dan penggunaan dana dimaksud secara periodik akan tercatat dalam neraca keuangan daerah sebagai penyertaan modal, sebagaimana dimaksud** Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kongkretnya, **dana bantuan tersebut merupakan modal dasar dari PT yang akan dibentuk yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kapet Khatulistiwa sesuai dengan jumlah dana masing-masing.**

2. Penyesuaian Kawasan Kapet Khatulistiwa dengan Kawasan Ekonomi Khusus

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka terdapat tiga pola pengaturan kawasan ekonomi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga pola kawasan ekonomi tersebut adalah **Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kawasan Khusus (KK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).** Ketiganya memiliki karakteristik khusus dan memerlukan sinergitas yang harmonis sebagai berikut :

1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), sudah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP KTI). Keputusan Presiden ini merupakan kebijakan embrio terbentuknya KAPET. DP KTI bertugas menggagas dan merumuskan konsepsi pengembangan KTI, termasuk kebijakan yang diperlukan untuk mendukungnya.

Sebagai wujudnya, ditetapkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu (KAPET). Berdasarkan Keputusan Presiden ini, lahir Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi KAPET, yaitu 13 KAPET, 12 KAPET di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 1 KAPET di Kawasan Barat Indonesia (KBI), berdasarkan :

- 1) Keppres No. 10 Tahun 1996 jo Keppres 90 Tahun 1996 tentang Pembentukan KAPET Biak.
- 2) Keppres 11/1998 tentang Pembentukan KAPET Batulicin.
- 3) Keppres 12/1998 tentang Pembentukan KAPET Sasamba.
- 4) Keppres 13/1998 tentang Pembentukan KAPET Sanggau.**
- 5) Keppres 14/1998 tentang Pembentukan KAPET Manado Bitung.
- 6) Keppres 15/1998 tentang Pembentukan KAPET Mbay.
- 7) Keppres 164/1998 tentang Pembentukan KAPET Parepare.
- 8) Keppres 165/1998 tentang Pembentukan KAPET Seram.
- 9) Keppres 166/1998 tentang Pembentukan KAPET Bima.
- 10) Keppres 167/1998 tentang Pembentukan KAPET Batui.
- 11) Keppres 168/1998 tentang Pembentukan KAPET Bukari.
- 12) Keppres 170/1998 tentang Pembentukan KAPET DAS Kakab.
- 13) Keppres 171/1998 tentang Pembentukan KAPET Sabang

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pada akhirnya kebijakan KAPET disempurnakan kembali melalui Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000. Berdasarkan Keppres Nomor 89 Tahun 1996, memformulasikan pengertian KAPET sebagai wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan : a. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau c. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Tujuan dari pembentukan KAPET adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dan beberapa lainnya di KBI. Inti dari pendekatan KAPET adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan

prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.

b. Fasilitas dan Kemudahan KAPET

Berdasarkan Keppres 9 Tahun 1998, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usah adi dalam KAPET diberikan perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan, berupa :

- 1) Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
- 2) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan.
- 3) Kompensasi kerugian, mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun.
- 4) Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen, sebesar 50% dari jumlah yang harus seharusnya dibayar.
- 5) Pengurangan biaya sebagai berikut : a. Berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan. b. Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati umum.

Selain perlakuan perpajakan, dengan memperhatikan kondisi masing-masing KAPET, kepada pengusaha KAPET dapat diberikan perlakuan perpajakan tambahan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas :

- 1) Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
- 2) Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.

- 4) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antarpengusaha di dalam KAPET yang sama atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET.
- 5) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET.
- 6) Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada atau antar pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET.
- 7) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan KAPET.
- 8) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dilakukan di KAPET.

c. Kelembagaan

Kelembagaan KAPET di pusat berbentuk Badan Pengembangan (Bapeng) KAPET, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Wakil Ketua adalah Menteri Kimpraswil, serta Sekretaris adalah Menteri Bappenas.

Anggota Bapeng KAPET adalah Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Perindag, Menteri Perhubtel, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Otda, Menteri Budpar, Menteri Muda Urusan PPKTI, dan Kepada BPN.

Tugas Bapeng KAPET adalah : a. Memberikan usulan kepada Presiden untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari Gubernur yang bersangkutan; b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat

pembangunan KAPET; c. Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET; d. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan KAPET; e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET.

Sementara di tingkat daerah, kelembagaan KAPET adalah Badan Pengelola (BP) KAPET. Ketua BP KAPET adalah Gubernur dan anggotanya meliputi tenaga ahli profesional. Tugasnya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi pada KAPET.

d. Sumber Pembiayaan dan Pendapatan

Dalam Keppres 150 Tahun 2000, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bapeng KAPET dan BP KAPET dibebankan kepada APBN. Sementara, untuk pengelolaan dan pembangunan di KAPET dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kendala dan Isu Permasalahan Pengembangan KAPET

Kelembagaan pengelola dan pelaksana : a. kurangnya komitmen dan konsistensi implementasi kebijakan KAPET; b. kurang efektifnya Keppres 150/2000, BP KAPET tidak memiliki kewenangan eksekuting; c. kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait.

Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal : a. tidak menariknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam upaya menarik investor; b. belum memadainya kondisi sarana prasarana.

Iklim investasi belum kondusif : a. proses perijinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, tidak transparan, banyaknya Perda yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya; b. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya perkembangan dunia usaha dalam mendorong pengembangan industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

Terbatasnya aksesibilitas pendukung kelancaran pengembangan usaha di kawasan seperti kurangnya sarana prasana/infrastruktur, tidak berkembangnya jaringan pasar, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha, kurangnya transfer teknologi bagi pelaku usaha sehingga produk kurang berkualitas dan kurang efisien, data dan informasi yang diperlukan tidak akurat dan tidak lengkap.

2. Kawasan Khusus (KK)

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, bahwa pembentukan **kawasan khusus** tidak semata hanya di bidang ekonomi saja, tetapi kawasan dalam rangka untuk menyelenggarakan **fungsi-fungsi pemerintahan tertentu** yang **bersifat khusus** dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya bentuk “**kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi**”. Upaya untuk pembentukan kawasan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

3. Kawasan Ekonomi Khusus

Isu seputar KEK telah bergulir sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penandatanganan kerja sama pembentukan *Special Economic Zone* (SEZ) bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Turi Beach Resort, 25 Juni 2006.

Kemudian berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dinormatiskan eksistensi Kawasan Ekonomi Khusus, yang menyatakan : “Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan **kawasan ekonomi khusus**”.

Keinginan pemerintah untuk merealisasikan KEK juga diungkapkan Wapres Jusuf Kalla,¹⁸ bahwa gagasan memperjelas KEK di beberapa daerah yang diprediksi potensial menjadi industrial cluster sesuai dengan kapasitas kawasan masing-masing, yakni sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Gagasan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Business News No 7388/17-7-2006, Hlm. 5.

Amanat pembentukan KEK dalam suatu UU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007, telah dilakukan pemerintah dengan disiapkannya Naskah Akademis dan Draft RUU tentang KEK, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK. Bahkan dalam Program Legislasi Nasional tahun 2008, RUU tentang KEK merupakan salah satu prioritas RUU di antara 31 RUU yang akan menjadi dibahas oleh pemerintah dan DPR pada tahun anggaran 2008.¹⁹

Menurut **Ronny Sautma Hotnza Bako**,²⁰ , Upaya pemerintah untuk mengembangkan daerah tertentu sebagai bagian dari KEK juga pernah diungkapkan oleh Menteri Perdagangan RI Mari Pangestu dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI.²¹ Pembentukan KEK merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan ekspor dan investasi diperlukan berbagai kebijakan khusus. Hal ini juga sebagai upaya untuk menandingi negara pesaing utama seperti RRC,²² Vietnam, Malaysia dan Thailand. Kebijakan khusus dalam kerangka KEK dimaksud dalam bentuk fasilitas khusus di bidang perpajakan, kepabeanan, infrastruktur pendukung, kemudahan perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan.

Bagi pemerintah Indonesia keinginan untuk mengembangkan suatu KEK ada hubungannya dengan kegiatan investasi pada umumnya, dapat dilihat dari tujuan pengembangan KEK, yaitu:²³

- a. peningkatan investasi;
- b. penyerapan tenaga kerja;
- c. penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;
- d. meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;

¹⁹ Lihat Keputusan DPR-RI No 02/DPR-RI/11/2007-2008 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2008.

²⁰ Ronny Sautma Hotnza Bako, Permasalahan Di Seputar Kawasan Ekonomi Khusus, Artikel, LEGISLASI INDONESIA Vol. 5 No. 2- Juni 2008.

²¹ Lihat risalah rapat kerja antara Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal 11 Juli 2006.

²² Di RRC ada beberapa daerah SEZ, misalnya daerah Senchen dan kota Pudong. Di kedua kota tersebut pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarannya, sedangkan kegiatan investasi asing dilaksanakan oleh National Development Reform Commission yang bertugas untuk mengawasi kegiatan investasi di daerah tersebut, sedangkan Ministry of Foreign Trade and Commerce (MOFCOM) melakukan eksaminasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh NRDC (lihat laporan kunjungan kerja ke RRC, 28 November 2006).

²³ Budi Santoso, "Tinjauan Dan Perspektif Departemen Perdagangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus", Jakarta 4 April 2008.

- e. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor; dan
- f. mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi. Maksud pengembangan KEK, antara lain;²⁴
 - 1) Memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
 - 2) Meningkatkan pendapatan devisa bagi negara melalui perdagangan internasional; dan
 - 3) Meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan-dan investasi.

Selain itu fungsi dari diadakannya KEK, antara lain:²⁵

- a. Menjadi pusat kegiatan ekonomi dan terkait dengan wilayah pengembangan lainnya;
- b. Harus mampu memberikan manfaat bagi kawasan lain;
- c. KEK bukan merupakan kawasan tertutup sehingga memberikan efek ganda terhadap perekonomian lokal; dan
- d. Harus dapat mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitar kawasan.

Bagi kalangan investor asing, pentingnya masalah legalitas akan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pengelolaan suatu kawasan. Biasanya calon investor akan melakukan perhitungan bisnis bila mereka melakukan suatu kegiatan bisnis pada suatu kawasan. Kepentingan para investor dapat termotivasi apabila kawasan perdagangan tersebut mempunyai pengakuan hukum (*legal recognition*) ke luar atau ke dalam.²⁶

Akibat adanya pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2000, sejumlah daerah mengalami *euphoria* sehingga menganggap wilayahnya tersebut siap dijadikan Kawasan KEK. Padahal kenyataannya, selain masih jauh dari kesiapan infrastruktur, sebenarnya tidak semua wilayah di Indonesia siap dijadikan KEK. Salah satu daerah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ronny Sautma Hotnza Bako, *Op. Cit.*

(Kepri) yang dianggap cukup berhasil dengan konsep *Free Trade Zone*, dan daerah Bitung yang cukup berhasil dengan pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Provinsi Sulawesi Utara.²⁷

Batam, Bintan dan Karimun sebagai proyek percontohan KEK sebagaimana MOU antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura pada tanggal 25 Juni 2006 tetap terus dilanjutkan walaupun instrumen hukum yang tegas belum diundangkan oleh pemerintah. Alasan utama pemerintah" menetapkan BBK sebagai KEK karena kondisi infrastruktur yang sudah memadai, besarnya jumlah investasi dalam dan luar negeri di kawasan itu dan lokasi geografis yang strategis. Artinya daerah itu sudah siap untuk dikembangkan sebagai KEK dalam waktu singkat.²⁸

Bahkan kajian akademis tentang kesiapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus telah diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan atau narasumber untuk kelak menjadikan Batam sebagai KEK. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa untuk menjadikan Batam sebagai suatu kawasan dalam kategori kelas dunia, maka Batam harus memberikan pelayanan kelas dunia, baik dalam perijinan, perpajakan dan kepabeanan. Selain itu kawasan ini juga dapat memberikan fasilitas keamanan dunia, memiliki infrastruktur kelas dunia, baik untuk fasilitas jalan raya, pelabuhan, airport, transportasi, telekomunikasi, listrik dan baik.²⁹

Walaupun MOU sudah ditandatangani dan sudah ada kajian akademis tentang Batam sebagai proyek percontohan KEK, tetapi pelaksanaannya masih terhambat terutama belum jelasnya insentif yang akan diberikan kepada KEK BBK tersebut. Padahal pada saat penandatanganan MOU tersebut, Presiden sudah menjanjikan akan memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal kepada calon investor. Adapun fasilitas yang akan dinikmati antara lain di sektor perpajakan, investor yang berinvestasi di kawasan ini akan memperoleh pembebasan pajak dalam jangka waktu minimal lima tahun dan diskon pajak untuk jenis industri tertentu, di sisi bea dan cukai, barang yang keluar masuk pelabuhan ke lokasi usaha atau sebaliknya akan dipermudah dengan pemeriksaan di lokasi usaha,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

sena di bidang izin investasi akan diberikan oleh badan pengusaha kawasan dengan pola layanan satu atap di setiap lokasi.³⁰

Ketidak jelasan terhadap konsep KEK juga terjadi untuk menentukan daerah di BBK yang akan dijadikan KEK, misalnya di Bintan dan Karimun kawasan itu hams steril serta Badan Kawasan dan Badan Pengusahaannya hams jelas, ungkap Bambang Susanto selaku Sekretaris Tim Nasional KEK Indonesia. Bintan dan Karimun akan diperlakukan berbeda dengan Batam, sebab kedua kawasan ini akan dikembangkan dengan sistem enclave, yakni ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang dikelilingi area non ekonomi khusus, sementara Batam berstatus KEK seluruhnya.³¹

Bagi pemda BBK dengan ditunjuknya daerah mereka sebagai proyek percontohan KEK, maka pemda diberikan keleluasaan atau diberi ruang yang lebih luas di dalam mengelola hasil kesepakatan kerjasama ekonomi tersebut, tetapi untuk merealisasikan terhadap kesempatan tersebut tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemda untuk menindaldanikuti kerjasama tersebut, antra lain : a. Kesiapan aparatur di daerah dalam menyikapi masuknya investasi di daerah mereka; b. Kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan c. Kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan masuknya kegiatan investasi model Singapura dengan pola ketja seperti di Singapura.³²

Dipilihnya BBK sebagai KEK memberikan dorongan positif pada pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi di sisi lain, provinsi-provonsi lain merasa iri hati dengan situasi tersebut. Apalagi provinsi-provinsi lain tidak mempunyai kriteria lengkap seperti yang terjadi pada KEK di BBK. Untuk itu hendaknya proyek percontohan BBK sebagai KEK hams didukung secara maksimal oleh semua pihak, khususnya oleh pemerintah pusat, sedangkan keinginan daerah lain untuk membentuk KEK di daerahnya hams dilakukan melalui kajian yang cukup komprehensif, karena pembentukan suatu daerah sebagai KEK memerlukan biaya yang cukup besar dan dampak sosial bagi masyarakat di daerah tersebut. Jadi walaupun ada keinginan pemerintah

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

untuk membentuk 112 KEK sebagaimana diungkapkan oleh Hermanto Dardak selaku Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum¹⁷, perlu diperhatikan seksama sebab jangan sampai model pemekaran wilayah yang ada saat ini dikembangkan oleh daerah dengan mengembangkan kawasan daerahnya menjadi KEK.³³

Akhirnya untuk menjadikan BBK sebagai KEK, maka nantinya payung hukum atas eksistensi BBK sebagai KEK harus benar-benar diatur secara komprehensif dalam RUU KEK mendatang. Jangan sampai pengalaman FTZ di Batam dalam sistem hukum terulang kembali di KEK. Kekhawatiran ini wajar saja mengingat pernyataan Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu¹⁸ yang mengatakan bahwa terkait dengan belurnjelasnya peraturan bagi investor yang berinvestasi di KEK, yang masih menunggu kesiapan instrumen atas KEK tersebut. Kekhawatiran senada juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Sistem Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa dua kendala besar yang harus dibenahi yaitu aspek legalitas dan kualitas kelembagaan pemerintah.³⁴

Untuk menjadikan BBK sebagai kawasan khusus yang bernama KEK, maka percepatan untuk membentuk RUU KEK harus segera dilakukan sebab dengan sudah dijadikan BBK sebagai proyek percontohan, maka pendulum penentu berhasil atau tidak berhasilnya program KEK ini berada kepada pengaturan KEK dalam sistem hukum nasional, khususnya terbentuknya RUU KEK. Apalagi RUU KEK sudah menjadi prioritas program legislasi nasional tahun 2008. Maka sudah saatnya perbedaan kepentingan atas pelaksanaan KEK dapat diakhiri dan semua pihak mau duduk bersama untuk mengatur kepentingan mereka dalam RUU, sehingga dalam waktu yang tidak lama RUU KEK dapat segera dibahas di DPR-RI.

Dari hasil penelitian terhadap data sekunder, menunjukkan **Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet)** hakikatnya merupakan bagian integral dari rancangan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. Istilah kawasan ekonomi khusus telah digunakan di berbagai negara, tetapi tidak setiap negara

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

menggunakan istilah yang sama untuk menamai Kawasan Ekonomi Khusus, seperti seperti ShenZhen Cina menggunakan istilah **Industrial Park Zone**, Dubai menggunakan istilah **Free Zone**, India dan Mesir menggunakan istilah **Special Economic Zone**. Sementara di Indonesia sendiri mengadopsi **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam wilayah Hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.³⁵

Kawasan Ekonomi Khususnya, dibentuk untuk membuat lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Gagasan ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Cina dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Pemberlakuan status KEK bagi daerah tertentu sangat memberikan keuntungan ekonomi secara nasional maupun regional. Tetapi, status ini juga berpotensi merugikan, karena adanya pengurangan pendapatan pajak akibat adanya insentif fiskal, dan dapat mengancam kawasan industri yang telah ada untuk pindah ke KEK yang berdampak pengurangan terhadap penerimaan negara.

Nyatanya tidak semua KEK berhasil di terapkan, dari hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan di beberapa negara. Hal yang paling utama adalah lokasi KEK yang ditunjuk berada di daerah terpencil (*Remote Area*), sehingga membutuhkan biaya yang tinggi, disamping fasilitas infrastruktur tak memadai, dan belum terdapat mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangannya. Menengok kegagalan ini maka KEK yang akan

³⁵ Ayu Prima Yesuari, Pengembangan Kawasan Ekonomi Indonesia, Artikel, bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi3d.pdf, diakses 15 Agustus 2012.

dikembangkan di Indonesia harus berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional, memiliki infrastruktur yang memadai, serta perlunya menggunakan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta dalam pengembangan KEK tersebut.

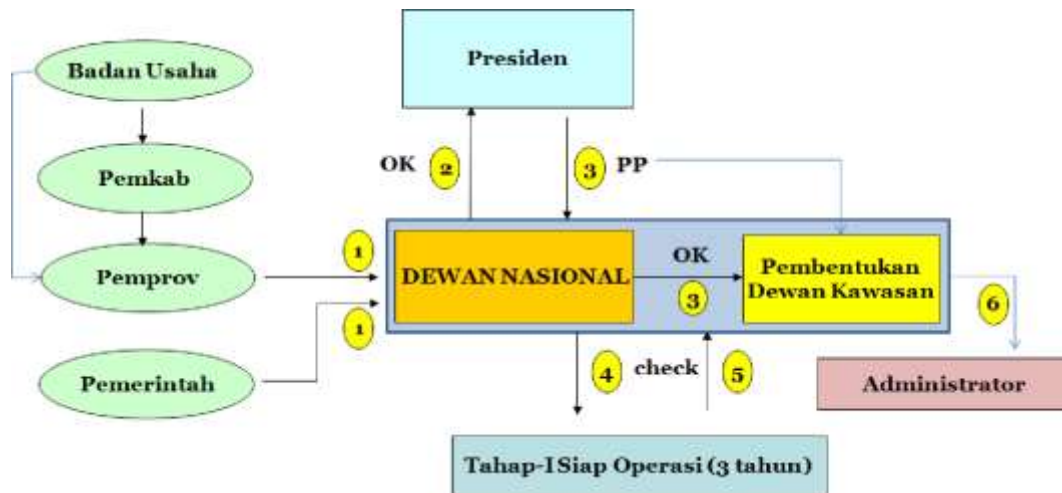
Sementara itu, perbedaan utama KEK dengan kawasan ekonomi lainnya (termasuk Kapet), selain kemudahan yang diberikan adalah banyaknya peran Pemerintah Daerah, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hal itu menyebabkan perlunya kerjasama Pemerintah-Swasta dalam pengelolaan KEK, mengingat dana untuk KEK ini sangat besar. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan KEK dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Sejak itu, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan KEK, diantaranya Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Kemudian struktur kelembagaan dalam pengembangan KEK terdiri atas dua tingkatan, yaitu, Dewan Nasional di pusat dan Dewan Kawasan di setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Pada setiap KEK dibentuk administrator. Sedangkan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah ditetapkan. KEK dapat diusulkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah. Usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Nasional untuk memperoleh persetujuan.

Gambar

Mekanisme Pengusulan KEK



Sumber: Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, 2009.

Persyaratan utama pengusulan KEK ini adalah : sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu Kawasan Lindung, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran Internasional, mempunyai batas yang jelas, serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mendukung KEK. Sedangkan ketentuan luas minimum tidak dicantumkan, guna membuka peluang bagi pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis teknologi tinggi atau teknologi informasi, seperti technopark, IT Center, dsb. Tantangan dalam pengembangan KEK tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yang menargetkan pembentukan 5 lokasi KEK di tahun 2014. Sementara saat ini terdapat 50 lokasi yang mengusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yang tersebar di 27 Provinsi.

Gambar

Peta Usulan Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus



Sumber: Hasil Olahan Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010.

Tetapi berdasarkan pengalaman beberapa negara, KEK terbentuk cukup lama setelah di tetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya amanah dan implementasi dari Undang-Undang KEK yang harus disiapkan, seperti peraturan rinci tentang penyelenggaraan KEK, peraturan perpajakan dan kepabeanan di KEK, serta pengaturan tentang kelembagaan KEK. Sedangkan pemerintah harus segera menyelesaikan peraturan-peraturan tersebut untuk mencapai target pembentukan KEK yang telah ditetapkan di RPJMN 2010-2014. Jika Pemerintah menyelesaikan peraturan tersebut pada tahun 2010, maka proses penetapan KEK baru dapat dimulai pada awal tahun 2011.

4. Substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Jika dicermati substansi pokok Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka diperoleh pemahaman tentang dasar pikiran dan kaidah umum pengaturan kawasan ekonomi khusus, antara lain sebagai berikut:

a. Landasan Konstitusional Demokrasi Ekonomi Indonesia

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dan dukungan pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi dan sekaligus memberikan manfaat bagi industri dalam negeri. Berkaitan dengan hal itu, dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disediakan lokasi bagi UMKM dan koperasi agar dapat mendorong terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung Pelaku Usaha lain.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan *geoekonomi* dan *geostrategis*. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

b. Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.³⁶

³⁶ Pasal 1 butir 1 huruf Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

c. Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.³⁷

d. Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; e. pengembangan teknologi; d. pariwisata; e. energi; dan/atau g. ekonomi lain. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.

Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.³⁸

e. Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;
- c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
- d. mempunyai batas yang jelas.³⁹

f. Tujuan Pengembangan KEK

Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan

³⁷ Pasal 2, *Ibid.*

³⁸ Pasal 3, *Ibid.*

³⁹ Pasal 3, *Ibid.*

ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

g. Lembaga Penyelenggara KEK

Untuk menyelenggarakan KEK, dibentuk lembaga penyelenggara KEK yang terdiri atas Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan membentuk Administrator KEK di setiap KEK untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian Operasionalisasi KEK. Kegiatan usaha di KEK dilakukan Oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati Oleh penanam modal. Fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas fiskal, yang berupa perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal, yang berupa fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lain yang dapat diberikan pada Zona di dalam KEK, yang akan diatur Oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pengawasan KEK

Dalam hal pengawasan, ketentuan larangan tetap diberlakukan di KEK, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Namun, untuk ketentuan pembatasan, diberikan kemudahan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan Oleh Pemerintah dengan tetap mengutamakan pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan KEK sebagai tempat melakukan tindak pidana ekonomi.

I. Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus

a. Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh). Selain fasilitas PPh, dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona. Fasilitas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa: a. penangguhan bea masuk; b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan c. tidak dipungut PPh impor. Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴²

Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimp0r untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor: a. dipungut bea masuk dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan b. dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang sebagaimana dimaksud diberlakukan ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

⁴⁰ Pasal 30, *Ibid.*

⁴¹ Pasal 31, *Ibid.*

⁴² Pasal 32, *Ibid.*

⁴³ Pasal 33, *Ibid.*

Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.⁴⁵

c. Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Investasi

Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah.⁴⁷

Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi Orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan. Kemudahan dan keringanan dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.⁴⁹

d. Fasilitas dan Kemudahan Lain

Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain. Ketentuan mengenai fasilitas dan

⁴⁴ Pasal 34, *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 35, *Ibid.*

⁴⁶ Pasal 36, *Ibid.*

⁴⁷ Pasal 37, *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 38, *Ibid.*

⁴⁹ Pasal 39, *Ibid.*

kemudahan lain diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

3. Ketenagakerjaan

Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.⁵¹ Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas: a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan; b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan. (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsur asosiasi pengusaha. (3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.⁵³

Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan oleh gubernur yang tugas dan fungsinya sebagai berikut: a. memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan; dan b. membahas permasalahan pengupahan. Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha, tenaga ahli, dan perguruan tinggi. Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan lembaga lain.⁵⁴

Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur Oleh gubernur. Penetapan upah minimum mempertimbangkan paling

⁵⁰ Pasal 40, *Ibid.*

⁵¹ Pasal 41, *Ibid.*

⁵² Pasal 42, *Ibid.*

⁵³ Pasal 43, *Ibid.*

⁵⁴ Pasal 44, *Ibid.*

sedikit: a. upah minimum sebagai jaring pengaman; b. kemampuan UMKM dan koperasi; dan c. kebutuhan hidup layak (KHL).⁵⁵

Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, dapat dibentuk 1 (satu) forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiap perusahaan. Ketentuan mengenai pembentukan forum serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.⁵⁶

Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha. Dalam PKB disepakati: a. jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain; dan b. bentuk hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Dalam hal perusahaan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali paling lama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan pembaruan.⁵⁷

i. Kesatuan Pengaturan Kawasan Khusus

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, diharapkan terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang ada di Indonesia dengan memberi kesempatan kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

⁵⁵ Pasal 45, *Ibid.*

⁵⁶ Pasal 46, *Ibid.*

⁵⁷ Pasal 47, *Ibid.*

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang untuk diusulkan menjadi KEK, baik dalam jangka waktu maupun setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, tidak terjadi lagi pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.⁵⁸

Dengan beralihnya status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁹

Penutup

Menutup uraian penelitian tesis ini, dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan Industri Semparuk belum dapat dibangun sebagaimana direncanakan adalah :

a. Belum terbentuknya **Perusahaan Industri sebagai BUMD** dan **penempatan modal perusahaan** sebesar Rp. 1.800.000.000,00 sebagai

⁵⁸ Pasal 48, *Ibid.*

⁵⁹ Pasal 49, *Ibid.*

modal dasar/dana sharing/penyertaan modal untuk mengelola Kapet Khatulistiwa dan khususnya Kawasan Industri Semparuk. Para responden juga menyatakan, Peraturan Perundangan mengatur **Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Industri, Pembebasan Tanah, Pengurusan HGB, dan kelengkapan administrasi lainnya** masih berbelit-belit dan belum cukup menunjang untuk menarik minat Investor melakukan investasi di Kawasan Industri Semparuk.

b. Pada saat penelitian ini dilakukan, baik prasana maupun sarana di Kawasan Industri Semparuk masih belum ada kegiatan **Pematangan Tanah, Pembangunan Sarana dan Prasarana** kawasan karena adanya kendala yuridis sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas. Selain itu faktor pelayanan, ketertarikan calon investor, stabilitas politik, dan stabilitas perekonomian nasional maupun di daerah juga berpengaruh terhadap kelancaran pengembangan Kawasan Industri Semparuk.

2. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat terbangunnya Kawasan Industri Semparuk adalah dengan mempercepat pembentukan Badan Hukum Perusahaan Kapet Khatulistiwa/Kawasan Industri Semparuk dan ke depan melakukan Penyesuaian pengelolaan Kawasan Kapet Khatulistiwa dengan Kawasan Ekonomi Khusus.

B. Saran

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, diharapkan terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang

ekonomi yang ada di Indonesia baik terhadap Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas maupun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

Karena itu, Kawasan Pembangunan Ekonomi Khatulistiwa dapat diperluas/diintegrasikan atau dilebur menjadi kawasan ekonomi khusus, yang bersinergi dengan pengembangan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alexander Seran, 1999, Moral Politik Hukum, Obor, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Tanpa Tahun, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta.
- Erman Rajagukguk. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar di ucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.
- _____, Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke 44, Medan, 20 Nopember 2001.
- Gunarto Suhardi. 2002. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hikmahanto Juwana. 2002. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Jakarta: Lentera Hati.
- Hari C. Hand, 1994, Modern Jurisprudence, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Hans Kelsen, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Lily Rasjidi, 1985. Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu, Bandung : Alumni.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Cetakan Pertama.

- Ratih Lestarini, 1988, Ilmu Ekonomi dan Hukum dalam buku Disiplin hukum dan Disiplin Sosial, Penyunting Soerjono Soekanto dan Otje Salman, Rajawali Press, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang.
- Rustian Kamaluddin, Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, disajikan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda di Jakarta, 4-6 Desember 2000.
- Sadono Sukirno, 2006, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V.
- _____, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Penerbit UKI Press, Jakarta.
- _____, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Kompas, Jakarta.
- _____, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Tanpa Tahun, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, Erlangga, Jakarta.
- Soerjono dan Sri Mamoedji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.
- Soleman, B, Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Sulasi Rongiyati, Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Sunaryati Sunaryati, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- T. Mulya Lubis, ed., 1986. Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 1992, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- T Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang, Jakarta.